

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN MITIGASI KREDIT BERMASALAH BAGI PENGELOLA LEMBAGA PERKREDITAN DESA

I Nengah Suarmanayasa¹, Ni Made Ary Widiastini², Ida Bagus Koman Suarmaja³

^{1,2,3}Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha
email: nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id

Abstract

Village Credit Institutions, hereinafter referred to as LPD, are financial institutions owned and domiciled in the desa adat. LPD desa adat Penglatan is one of the LPDs located in the Buleleng sub-district. Under normal conditions, LPD desa adat Penglatan always has a very good performance which is reflected in the level of health of the LPD and the achievement of the annual target. In general, the Covid-19 pandemic has had an impact on the credit quality of LPDs. Credit quality includes current loans, substandard loans, doubtful loans and bad loans. To anticipate the increase in non-performing loans, it is necessary to carry out training and assistance on credit mitigation together with the LPD desa adat Penglatan. Service activities aim to provide understanding and increase the competence and skills of LPD managers in mitigating non-performing loans. This activity involved the Undiksha service team and the Buleleng Regency LPLPD. It is hoped that this activity can improve the competence and skills of LPD managers

Keywords: *non performing loans, LPD, mitigations*

Abstrak

Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik dan berkedudukan di wilayah *Desa adat*. LPD desa adat Penglatan adalah salah satu LPD yang berlokasi di kecamatan Buleleng. Pada kondisi normal, LPD desa adat Penglatan selalu memiliki kinerja yang sangat baik yang tercermin dari tingkat kesehatan LPD serta capaian target tahunan. Secara umum, Pandemi Covid 19 berdampak pada kualitas kredit LPD. Kualitas kredit meliputi kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Untuk mengantisipasi peningkatan kredit bermasalah perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan mitigasi kredit bersamalah pada LPD desa adat Penglatan. Kegiatan pengabdian bertujuan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kompetensi dan keterampilan pengelola LPD dalam mitigasi kredit bermasalah. Kegiatan ini melibatkan tim pengabdian Undiksha dan LPLPD Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini mampu meningkatkan kompetensi dan keterampilan pengelola LPD.

Kata Kunci: *kredit bermasalah, LPD, mitigasi*

PENDAHULUAN

Desa adalah sumber masalah sekaligus sumber solusi untuk kemajuan Indonesia (Iskandar, 2020). Salah satu masalah bagi masyarakat desa adalah kelangkaan modal (*lack of capital*). Keterbatasan akses terhadap modal (kredit) adalah salah satu faktor penyebab kemiskinan di desa (Suarmanayasa, 2016). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diyakini sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah perdesaan. Ledgerwood (1999)

menegaskan bahwa tujuan LKM adalah untuk melayani kebutuhan finansial dari pasar yang tidak terlayani atau yang tidak dilayani dengan baik. Bank Dunia juga menegaskan bahwa kehadiran LKM diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang ada di daerah perdesaan.

Salah satu lembaga keuangan desa yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan cara memberikan pelayanan di bidang

keuangan. LPD merupakan salah satu kearifan lokal Bali yang dikelola dari, oleh, dan untuk rakyat (*krama desa*). Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Di akhir tahun 2019, masyarakat dunia dikejutkan dengan adanya *Coronavirus disease* 2019 (Covid-19). Covid-19 telah menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Pandemi Covid 19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia (Pakpahan, 2020). Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi Covid 19 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Sektor yang terkena dampak selama pandemi Covid 19 adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor rumah tangga (Susilawati et al., 2020).

Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata sangat merasakan dampak adanya pandemi Covid-19. Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang selalu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Adanya pandemi Covid-19 membuat perekonomian Bali mengalami penurunan. Secara umum, perekonomian Bali merasakan dampak adanya pandemi Covid 19. Hal ini tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi yang negatif. Ekonomi Bali pada triwulan II-2020 tercatat tumbuh negatif (menyusut atau berkontraksi) - 7,22 persen, jika dibandingkan capaian triwulan I-2020 (*q-to-q*). Jumlah penduduk miskin di Bali juga mengalami peningkatan. Secara persentase, penduduk miskin di Bali pada Maret 2020 tercatat sebesar 3,78 persen.

LPD menyatakan bahwa LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk *krama desa*.

Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan 0,17 persen jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 (3,61 persen).

Dampak pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh LPD, terutama LPD yang berlokasi di daerah wisata atau LPD yang masyarakatnya dominan berprofesi di bidang pariwisata (Suarmanayasa, 2021). Selama tahun 2020, LPD Bali mengalami penurunan aset sebesar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp23,6 triliun. Adapun dari 1.308 LPD yang beroperasi di Bali hingga posisi akhir 2020, jumlah yang mengalami penurunan aset ada sebanyak 541 LPD atau sebesar 41,7 persen. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) LPD juga mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen menjadi Rp19,6 triliun. Perolehan laba LPD di Bali juga menurun sebesar 27,3 persen menjadi 398,63 miliar. (LPLPD, 2021)

Salah satu LPD yang ada di Kabupaten Buleleng, adalah LPD Desa Adat Penglatan. LPD ini berdiri sejak 4 April 1989 dengan pengurus sebanyak tiga orang yang terdiri dari ketua, kepala tata usaha dan kasir. Modal awal pendirian LPD ini sebesar Rp 4.500.000 yang berasal dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Saat ini, LPD memiliki karyawan sebanyak 14 orang. Akhir tahun 2019, aset LPD Penglatan mencapai Rp 39 Milyar dan laba yang dibukukan mencapai Rp 1,5 Milyar. Angka ini mencerminkan kinerja LPD yang baik.

Tabel 1.1 Perkembangan Kredit LPD Desa Adat Penglatan

Tahun	Total Kredit (Rp)	Kredit Bermasalah	Perubahan (%)	Persentase Kredit Bermasalah (NPL)
2019	28.347.341.000	2.045.313.000	0	-
2020	28.197.416.000	2.120.485.000	3,68	7,52
2021	26.568.168.000	3.355.920.000	58,26	12,63

Sumber: LPD Desa Adat Pnglatan, 2022

Adanya pandemi Covid-19 juga berdampak pada kondisi keuangan *krama desa adat* Pnglatan. Hasil wawancara dengan *pemucuk* LPD, diketahui bahwa cukup banyak *krama desa adat* Pnglatan yang bekerja di sektor pariwisata maupun bekerja pada sektor pendukung pariwisata. *Krama desa* yang awalnya bekerja dan tinggal di Denpasar pulang kampung karena dirumahkan oleh hotel maupun restaurant tempatnya bekerja. Kondisi ini berimplikasi pada kinerja LPD desa adat Pnglatan terutama pada sisi kredit.

Kredit yang disalurkan LPD diharapkan kembali dalam jangka waktu yang diperjanjikan dan dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran per bulan. Sebelum adanya pandemi (sebelum tahun 2020), angka NPL di LPD desa adat Pnglatan selalu di bawah 5%. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa angka NPL tahun 2020 sebesar 7,52% dan angka NPL di tahun 2021 meningkat menjadi 12,63%. Angka ini di atas ketentuan OJK. Jika dilihat dari nominal kredit maka jumlah kredit bermasalah pada tahun 2021 meningkat sebesar 58,26 % dari jumlah kredit bermasalah di tahun 2020. Data yang ditunjukkan pada tabel 1.1 mengindikasikan bahwa mitigasi kredit bermasalah pada LPD desa adat Pnglatan

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pelatihan dan pendampingan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut. 1) Tahap persiapan, meliputi melakukan diskusi dan koordinasi dengan anggota tim, melakukan observasi ke LPD Desa Adat Pnglatan, melakukan diskusi dengan kepala LPD, menyusun rencana program berdasarkan kesepakatan Bersama, dan menentukan waktu dan peserta pelatihan,

masih lemah. Kondisi ini mendesak untuk ditindaklanjuti sebagai upaya untuk menjaga kinerja serta mempertahankan kepercayaan *krama desa*. Jika kondisi ini dibiarkan dan terlambat ditangani maka besar kemungkinan akan terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Untuk itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan serta pendampingan mitigasi kredit bermasalah bagi pengelola LPD desa adat Pnglatan, kabupaten Buleleng penting dilakukan.

Pelatihan dan pendampingan mitigasi kredit bermasalah bagi pengelola LPD, Desa Adat Pnglatan, memiliki tujuan sebagai berikut. 1) Meningkatkan pemahaman tentang mitigasi kredit bermasalah pada LPD, dan 2) Meningkatkan keterampilan pengurus dan karyawan LPD dalam mitigasi kredit bermasalah. Manfaat yang diharapkan atas kegiatan pengabdian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1) Bagi mitra kegiatan yaitu pengurus LPD, Karyawan LPD, Pengawas LPD, bahwa kegiatan ini dapat membantu memberikan pemahaman dan meningkatkan kompetensi dan keterampilan tentang mitigasi kredit bermasalah yang terjadi pada LPD, 2) Bagi desa (adat dan dinas), kegiatan ini dapat dijadikan acuan dalam menjalankan pengawasan dan pembinaan LPD.

2) Tahap Pelaksanaan, meliputi memberikan materi pelatihan tentang mitigasi kredit bermasalah, dan, melakukan pendampingan dalam mitigasi kredit bermasalah, dan 3) Tahap pelaporan, meliputi menyusun laporan kemajuan, membuat prosiding hasil kegiatan penbadian, dan menyusun laporan akhir kegiatan.

Khalayak sasaran strategis dalam kegiatan ini adalah pengurus dan karyawan

LPD, serta Badan pengawas internal LPD. Keberhasilan kegiatan pengabdian ini ditentukan oleh tingkat pemahaman, dan keterampilan profesional pengelola LPD dalam mengimplementasikan mitigasi kredit bermasalah. Untuk itu, evaluasi tingkat keberhasilan kegiatan dilakukan 3 (tiga) kali,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan dan perencanaan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar. Setelah melakukan koordinasi dengan mitra yakni LPD Desa Adat Penglatan, disepakati hari dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di ruang pertemuan lantai 2 kantor LPD desa adat Penglatan. Kegiatan dilaksanakan pada hari sabtu, 3 September 2022. Kegiatan dimulai pukul 09.00 wita dan berakhir pukul 15.00 wita. Peserta kegiatan berjumlah 17 orang yang terdiri dari *pemucuk*, *penyarikan*, *petengan*, 3 orang *panureksa* dan 11 karyawan LPD.

Kegiatan pengabdian ini menghadirkan pembicara dari tim pengabdian Undiksha dan dari LPLPD (Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Rakyat) Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa disebutkan bahwa LPLPD mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan LPD melalui kegiatan 1) pembinaan teknis, 2) pemeriksaan/audit, 3) pelatihan, 4) mengelola dan perlindungan LPD, 5) mengelola dana penjaminan simpanan LPD, 6) mengelola dana penyangga likuiditas LPD, dan 7) penanganan masalah LPD. Kolaborasi dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tim akademisi memberikan materi tentang konsep dasar mitigasi kredit, dan dari Koordinator LPLPD memberikan materi tentang strategi dan cara-cara melakukan mitigasi kredit serta dampaknya terhadap kinerja LPD.

yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelatihan dan pendampingan ini adalah tes obyektif, pedoman observasi dan pedoman wawancara yang dikembangkan sendiri oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD, disebutkan bahwa kegiatan utama LPD adalah pemberian kredit. Kredit adalah sumber pendapatan utama dari LPD. Jika kualitas kredit baik, maka potensi laba LPD akan baik, begitu pula sebaliknya. Kualitas kredit disebut dengan kolektibilitas kredit. Kolektibilitas kredit dapat dibedakan menjadi 1) kredit lancar, 2) kredit kurang lancar, 3) kredit diragukan, dan 4) kredit macet. Lembaga keuangan bank dan non bank termasuk LPD selalu berupaya agar kualitas kredit yang disalurkan berkualitas baik yakni berkategori kredit lancar. Saat kondisi normal, kredit diragukan dan macet bisa terjadi, tetapi jumlahnya bisa dikendalikan. Adanya pandemi Covid 19 juga berdampak pada kualitas kredit LPD.

Salah satu cara untuk melihat kondisi/kualitas kredit LPD dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). NPL adalah perbandingan kredit bermasalah dengan total pinjaman. Rasio NPL maksimum 5%. Artinya, semakin tinggi NPL maka semakin buruk kondisi kredit dan nantinya berdampak pada laba LPD. LPD desa adat Penglatan merasakan dampak pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 berpengaruh terhadap angka NPL. Angka NPL meningkat saat adanya pandemic Covid 19. Kondisi ini harus segera diatasi dengan strategi dan kebijakan agar tidak semakin buruk.

Tim pengabdian Undiksha memberikan pemahaman dasar tentang kredit dan manajemen kredit. Dalam kegiatan sehari-hari, masyarakat sudah sering dan akrab dengan istilah kredit. Dalam bahasa latin kredit disebut

“*credere*” yang artinya percaya, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjam pasti kembali. Pengertian kredit menurut Undang-Undang

Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga



Gambar 1. Pemberian materi oleh Koordinator LPLPD Kabupaten Buleleng

Pada kegiatan tersebut koordinator LPLPD menekankan prinsip-prinsip penilaian kredit yang disebut dengan prinsip 5C. Prinsip 5C meliputi: 1) *Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya memberikan keyakinan kepada LPD bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya, 2) *Capacity* adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kreditnya, 3) *Capital*, biasanya LPD tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit

harus menyediakan sumber dana dari sumber lainnya. *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh LPD, 4) *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung LPD dari risiko kerugian dan 5) *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang datang.



Gambar 2. Peserta pelatihan serius mengikuti kegiatan

Kegiatan berjalan lancar. Setelah pemberian materi oleh dua narasumber dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan mitigasi kredit. Pelatihan mitigasi kredit diberikan dengan cara pembahasan kasus serta diskusi seputar kasus yang sering terjadi. Pihak LPD merasakan manfaat dari kegiatan ini. Peserta pelatihan sangat antusias mengikuti kegiatan, ini terlihat dari tidak ada peserta yang

meninggalkan tempat kegiatan. Artinya seluruh peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Pihak LPLPD berharap kegiatan ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, kolaborasi Undiksha dan LPLPD diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada LPD yang ada di wilayah kabupaten Buleleng.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah dilaksanakan dan berjalan sesuai rencana. Kegiatan ini terdiri dari 2 agenda yaitu, pemaparan materi tentang mitigasi kredit bermasalah dan pelatihan mitigasi kredit bermasalah bagi pengelola LPD desa adat Penglatan. Peserta kegiatan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, harapannya, kegiatan ini bermanfaat bagi pengelola LPD berupa peningkatan pemahaman dan peningkatan kompetensi dan

keterampilan tentang mitigasi kredit bermasalah yang terjadi pada LPD.

Pada kesempatan ini tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1) Ketua LP2M Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dana dan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan ini, 2) LPD desa adat Penglatan sebagai mitra kerja yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan ini, dan 3) Semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik tentang Profil Kemiskinan di Bali Maret 2020

Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik tentang Pertumbuhan Ekonomi Bali Semester I-2020

Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-

19. Baskara: *Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Iskandar. A. Halim. 2020. SDGs Desa. Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64.
- Suarmanayasa. I Nengah. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja LPD di Provinsi Bali. Penelitian DIPA Undiksha
- Suarmanayasa. I Nengah. 2020. Manajemen Perkreditan (Teori dan Aplikasi). Malang: Penerbit Kertasentuh
- Suarmanayasa, I. N., & Pendi, N. M. P. (2016). Peran Lembaga Perkreditan Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bali. In *Seminar Nasional Riset Inovatif* (Vol. 4).
- Suartana. (2009). *Arsitektur Pengelolaan Risiko Pada LPD*. Denpasar: Udayana University Press
- Sumodiningrat, Gunawan. 2016. Membangun Indonesia dari desa. Yogyakarta: Media Pressindo
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa